

LAMPIRAN

Penjelasan dan Rincian Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan:

- a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2019;**
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2019;**
- c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2019;**
- d. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019;**

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”): mengusulkan kepada Rapat untuk Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut;

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2019;

Memperhatikan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai dan sisa laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terdaftar untuk memeriksa buku dan informasi keuangan historis tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Sdri. Lucy Luciana Suhenda, SE. Ak. CPA sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

4. Penetapan gaji atau honorarium, bonus atau tantiem dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf (d), Pasal 20 Ayat 11, Pasal 23 Ayat 5 dan Pasal 17 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, tantiem atau bonus dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, tantiem atau bonus dan tunjangan lain untuk semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

5. Pengangkatan dan Penetapan kembali keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 huruf (c), Pasal 23, Pasal 20 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 94, Pasal 95, Pasal 109 dan Pasal 111 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk Mengangkat dan menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnya dan Mengangkat dan menetapkan kembali susunan anggota Dewan Pengawas syariah Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnya.

6. Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum harus dipertanggungjawabkan kepada RUPS Tahunan terdekat.